

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

PEMODELAN PERCEPATAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG

DENI SANTO



**DOKTOR MANAJEMEN DAN BISNIS
SEKOLAH BISNIS
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2025**



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA¹

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi dengan judul “Pemodelan Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Februari 2025

Deni Santo
NIM K1601202045

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



RINGKASAN

DENI SANTO. Pemodelan Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang. Dibimbing oleh NOER AZAM ACHSANI, ERNAN RUSTIADI, dan AGUS BUONO.

@Hak cipta milik IPB University

Sejak 2020, setelah diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada skala 1:5.000, dengan target 2.036 lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemenuhan target RDTR ini lebih didorong atas argumentasi ekonomi. Kebijakan peningkatan investasi merupakan salah satu agenda penerapan program reformasi birokrasi tematik sesuai arahan Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Minimnya ketersediaan RDTR menjadi salah satu penghambat percepatan proses perizinan berusaha dan berinvestasi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) di Indonesia.

Empat tahun program percepatan penyusunan RDTR telah dijalankan, namun capaian kinerja per 8 Januari 2024 hanya mencapai 399 RDTR (19,59 %). Berbagai intervensi kebijakan dan pendekatan teknis telah dilakukan, seperti: melakukan perubahan peraturan penataan ruang, bantuan anggaran kepada pemerintah daerah, penyederhanaan kegiatan dan pengurangan waktu pemrosesan RDTR, pemberian bantuan tenaga ahli perencana dan peningkatan kualitas SDM di Pemerintah daerah, serta bantuan teknis yang lebih intensif, namun pencapaian kinerja belum menunjukkan hasil yang signifikan. Prahipotesis permasalahan kinerja ini, bisa disebabkan faktor lain yang muncul, permasalahan yang terjadi pada detail proses bisnis di setiap tahapan penyusunan RDTR, yang perlu diteliti lebih jauh. Analisis terhadap proses bisnis ini sering di kesampingkan karena dianggap tidak terkait substansi perencanaan. Padahal refleksi proses bisnis dibutuhkan untuk menjawab tuntutan dan tantangan operasional, serta permasalahan lainnya yang memerlukan solusi berupa optimalisasi.

Penelitian ini difokuskan pada permasalahan sepanjang *procedural planning* penyusunan RDTR dari tahap persiapan hingga penetapan peraturan RDTR. Sumber data yang digunakan baik data primer maupun data sekunder. Sumber data primer berasal dari Survei Faktor Pengaruh bagi percepatan penyusunan RDTR dan Survei Post Reviu untuk mengevaluasi pelaksanaan penyusunan RDTR yang telah dilakukan oleh 213 Pemerintah Daerah, dan dilengkapi dengan wawancara kepada pakar serta *Focus Group Discussion* bersama *stakeholders* terkait. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui *desk study*.

Pengolahan data survei faktor pengaruh menggunakan metode *analytical hierarchy process* (AHP) berhasil mengidentifikasi urutan prioritas dan besaran faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan RDTR di Indonesia. Dalam penelitiannya ini dilakukan juga analisa stakeholder, analisa kebijakan eksisting, dan analisa ketatalaksanaan serta melakukan survey post reviu untuk mengidentifikasi kendala dan masalah yang terjadi pada pelaksanaan penyusunan RDTR yang dilakukan oleh 213 Pemerintah Daerah. Penelitian ini berhasil; 1) mengidentifikasi peran, tugas, kewenangan, bentuk partisipasi, aliran data dan informasi dari masing-masing aktor/stakeholder, serta relasi antara satu aktor dengan aktor lainnya, termasuk keterlibatan peran masyarakat dalam proses penyusunan RDTR, 2) mengidentifikasi kendala-kendala teknis yang muncul pada



proses bisnis as is penyusunan RDTR, 3) mengidentifikasi ketidaktepatan kebijakan dan tata kelola percepatan penyusunan RDTR.

Memperhatikan korelasi antara analisis tersebut, dapat disimpulkan beberapa kendala utama (*uncertainties*) yang menjadi titik kritis dalam tahapan penyusunan RDTR yang muncul; 1. komitmen pemerintah daerah, 2. keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM, 3. keterbatasan anggaran, dan 4. kendala teknis operasional pada setiap tahapan proses bisnis. Sementara itu, terdapat pula beberapa kendala lain yang selalu muncul berulang, salah satunya adalah kesulitan dalam memperoleh data valid dan terbaru dengan format spasial. Dengan adanya kondisi tersebut, implementasi kebijakan percepatan penyusunan RDTR masih belum tercapai karena proses penyusunan RDTR melebihi durasi waktu yang telah ditetapkan dan realisasi kinerja yang dicapai belum optimal.

Keberadaan titik kritis dan kendala pada setiap tahapan proses bisnis penyusunan RDTR perlu direspon dengan adanya skenario perbaikan proses bisnis (*business process improvement*). Skenario ini sekaligus juga menjadi kebaharuan penelitian yang menitikberatkan pada *Business Process Management* dan menghasilkan skema rekayasa atau *reengineering*. Rekayasa ini dilakukan untuk memperbaiki proses bisnis eksisting (*as is*) RDTR menjadi proses bisnis *to be* RDTR yang dirancang melalui perubahan posisi, pembagian tahapan, dan otomatisasi proses. Hasil dari skema *reengineering* ini memberikan konsekuensi dalam beberapa hal; 1. perubahan/pengkajian ulang pada Peraturan Pemerintah penyelenggaraan penataan ruang, 2. Perbaikan tata kelola perencanaan penataan ruang, 3. pemetaan dan penataan peran, kewenangan, dan tanggung jawab setiap *stakeholders* dalam penyusunan RDTR, 4. Peningkatan komitmen pemerintah daerah, 5. Standarisasi data sesuai Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia, 6. Penyediaan data dan *processing engine* RDTR Builder untuk mengotomatisasi proses analisis data. Konsekuensi tersebut dapat ditindaklanjuti dengan catatan bahwa seluruh pemilik proses bisnis terkait harus merumuskan kebijakan bersama untuk mengatur peran, tugas, wewenang, dan waktu penyelenggaraan dalam proses bisnis terintegrasi.

Kata Kunci : Perencanaan Tata Ruang (RDTR), Perbaikan Proses Bisnis, Pengembangan Kebijakan, Perencanaan Skenario



SUMMARY

DENI SANTO. Modeling Acceleration of Drawing Detailed Spatial Plan. Supervised by NOER AZAM ACHSANI, ERNAN RUSTIADI, dan AGUS BUONO.

Since 2020, after the issuance of the Job Creation Law, the Indonesian Government has established a policy to accelerate the preparation of Detailed Spatial Planning (RDTR) on a map scale of 1:5,000, with a target of 2,036 locations spread throughout Indonesia. The fulfillment of this RDTR target is more driven by economic arguments. The policy of increasing investment is one of the agendas for implementing the thematic bureaucratic reform program. The lack of availability of RDTR is one of the obstacles to accelerating the business licensing and investment process through the Online Single Submission (OSS) system in Indonesia.

The RDTR acceleration program has been running for four years, but the performance achievement as of January 8, 2024 only reached 399 RDTR (19.59%). Various policy interventions and technical approaches have been carried out, such as: making changes to spatial planning regulations, budget assistance to local governments, simplifying activities and reducing RDTR processing time, providing assistance to planning experts and improving the quality of human resources in local governments, as well as more intensive technical assistance, but the performance achievement has not shown significant results. The pre-hypothesis of this performance problem could be caused by other factors that arise, problems that occur in the details of the business process at each stage of the RDTR preparation, which need to be studied further. Analysis of this business process is often ignored because it is considered unrelated to the substance of planning. In fact, business process reflection is needed to answer operational demands and challenges, as well as other problems that require solutions in the form of optimization.

This study focuses on problems throughout the procedural planning of the RDTR preparation from the preparation stage to the determination of RDTR regulations. The data sources used are both primary and secondary data. The primary data source comes from the Survey of Influencing Factors for the acceleration of RDTR preparation and the Post Review Survey to evaluate the implementation of RDTR preparation that has been carried out by 213 Local Governments and is complemented by interviews with experts and Focus Group Discussions with related stakeholders. While secondary data is collected through desk study.

The results of the survey with data processing using the analytical hierarchy process (AHP) method succeeded in identifying the priority order and magnitude of the factors that influence the preparation of RDTR in Indonesia. In this research, stakeholder analysis, existing policy analysis, and management analysis were conducted as well as conducting a post-review survey to identify obstacles and problems that occurred in the implementation of RDTR preparation carried out by 213 Local Governments. This research succeeded in; 1) identifying the roles, tasks, authorities, forms of participation, data and information flows from each actor/stakeholder, and the relationship between one actor and another, including the involvement of the community in the RDTR preparation process, 2) identifying technical obstacles that emerged in the business process as is of RDTR preparation,

@Hak cipta milik IPB University



3) identifying inaccuracies in policies and governance for accelerating RDTR preparation.

Considering the correlation between these analyses, it can be concluded that several main obstacles (uncertainties) that are critical points in the stages of RDTR preparation that emerged; 1. local government commitment, 2. limited number and competence of human resources, 3. limited budget, and 4. technical operational obstacles at each stage of the business process. Meanwhile, there are also several other obstacles that always appear repeatedly, one of which is the difficulty in obtaining valid and up-to-date data with spatial format. With these conditions, the implementation of the policy to accelerate the preparation of the RDTR has not been achieved because the process of preparing the RDTR exceeds the specified time duration, and the realization of the performance achieved is not optimal.

The existence of critical points and obstacles at each stage of the business process of preparing the RDTR needs to be responded to with a business process improvement scenario. This scenario as novelty that focuses on Business Process Management and produces an engineering or reengineering scheme. This engineering is carried out to improve the existing business process (as is) RDTR into a business process to be RDTR which is designed through changes in position, division of stages, and process automation. The results of this reengineering scheme have consequences in several ways; 1. changes/reviews to the government regulation on spatial planning, 2. improvements to spatial planning governance, 3. mapping and structuring the roles, authorities, and responsibilities of each stakeholder in the preparation of the RDTR, 4. increasing the commitment of local governments, 5. standardization of data in accordance with the One Map and One Data Indonesia Policy, 6. provision of data and processing engine RDTR Builder to automate the data analysis process. The consequences can be followed up with the note that all related business process owners must formulate a joint policy to regulate the roles, tasks, authorities, and implementation time in the integrated business process.

Keywords: Spatial Planning RDTR; Business Process Improvement; Policy Development; Scenario Planning



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2025
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.

PEMODELAN PERCEPATAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG

DENI SANTO

Disertasi
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Doktor pada
Program Studi Doktor Manajemen dan Bisnis

**DOKTOR MANAJEMEN DAN BISNIS
SEKOLAH BISNIS
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2025**



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Penguji Luar Komisi pada Ujian Tertutup:

1. Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, MSc.
2. Prof. Dr. Iwan Rudiarto, ST., MSc.

Anggota Promosi Luar Komisi pada Sidang Promosi Terbuka:

1. Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, MSc.
2. Prof. Dr. Iwan Rudiarto, ST., MSc.

Judul Disertasi : Pemodelan Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Nama : Deni Santo
NIM : K1601202045

Disetujui oleh

Pembimbing 1:
Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, M.S.



Pembimbing 2:
Prof. Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr.



Pembimbing 3:
Prof. Dr. Ir. Agus Buono, M.Si., M.Kom.



Diketahui oleh

Ketua Program Studi Pascasarjana
Manajemen dan Bisnis
Prof. Dr. Ir. Ujang Sumarwan, M.Sc.
NIP 196009161986011001



Dekan Sekolah Bisnis:
Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, M.S.
NIP 196812291992031016



Tanggal Ujian Tertutup : 03 Januari 2025

Tanggal Lulus :

Tanggal Sidang Promosi Terbuka : 31 Januari 2025



PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanaahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga disertasi yang berjudul “Pemodelan Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang” ini dapat diselesaikan.

Terima kasih penulis ucapkan kepada para pembimbing, Bapak Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, M.S., Bapak Prof. Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr., dan Bapak Prof. Dr. Ir. Agus Bueno, M.Si., M.Kom., yang telah membimbing dan memberi saran serta kepada seluruh dosen yang demikian akrab dan terbuka memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional khususnya Bapak Nusron Wahid sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Bapak/ibu pimpinan di Direktorat Jenderal Tata Ruang yang memberikan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan diskusi yang intensif dan tidak lupa rekan-rekan DMB 17 SB IPB yang terus mendukung dalam proses penyusunan penelitian ini. Saya ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Sofyan A Djalil selaku selaku Menteri ATR/BPN periode 2016-2022 yang memberikan ijin tugas belajar mandiri dan terus mendukung dan memberikan arahan terhadap penelitian.

Penyelesaian program doktoral ini dipersembahkan untuk istri tercinta Ardhien Nissa Widhawati Siswojo beserta anak-anak, Aulia Fatihah Intishar Mawaddah dan Zaidan Muhammad Hanif Ijlal An Naafi. Kalian semua menjadi semangat dan penguat untuk ayah, terima kasih atas dukungan, doa, dan kasih sayangnya yang terus menerus sehingga Ayah dapat menyelesaikan disertasi ini. Rasa hormat dan ucapan terima kasih untuk kedua orang tua, H. Solihin dan Hj. Nunung Supraeni serta H. Gatot Siswojo dan Hj. Prihandinie yang selalu mendoakan.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun upaya maksimal dan terbaik telah diberikan. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan, serta menjadi bahan masukan untuk perbaikan kebijakan penataan ruang ke depan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk mewujudkan Satu Rencana Tata Ruang (*One Spatial Planning Policy*), Tata Ruang Sebagai Panglima Pembangunan, panduan seluruh sektor, serta sebagai pendorong kemudahan berusaha (*ease of doing bussiness*).

Bogor, Februari 2025

Deni Santo

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah	8
1.6 Potensi Kebaruan Penelitian	9
II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Sistem Perencanaan Tata Ruang	13
2.2 Perencanaan Penataan Ruang di Indonesia	20
2.3 Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang (<i>One Spatial Planning Policy</i>)	26
2.4 Proses Bisnis Penyusunan dan Penetapan RDTR	29
2.5 <i>Collaborative Planning</i> sebagai Upaya Percepatan Penyusunan RDTR	31
2.6 <i>Analytic Hierarchy Process</i> dalam Pembobotan <i>Variabel</i>	36
2.7 Pengembangan <i>Readiness Criteria Index</i> dalam Percepatan Penyusunan RDTR	41
2.8 <i>Network Analysis</i> untuk Analisis <i>Stakeholder</i>	43
2.9 <i>Scenario Planning</i> sebagai Upaya Memitigasi Perubahan	46
2.10 Posisi Penelitian terhadap Penelitian Lainnya	52
III METODE PENELITIAN	54
3.1 Rancangan Penelitian dan Kerangka Pikir	54
3.2 Lokasi Penelitian	54
3.3 Metode Pengumpulan Data	56
3.4 Metode Analisis dan Pengolahan Data	56
IV PENENTUAN FAKTOR-FAKTOR KUNCI YANG MEMENGARUHI PERCEPATAN PENYUSUNAN RDTR DAN BESARAN PENGARUHNYA TERHADAP PERCEPATAN PENYUSUNAN	68
4.1. Penentuan Faktor Pengaruh	68
4.2. Penyusunan dan Penyebaran Kuesioner	72
4.3. Pengolahan Data dan Hasil Analisis	73
4.4. Perumusan <i>Readiness Criteria Index</i>	84
V EVALUASI KEBIJAKAN EKSISTING TERHADAP REALISASI PERCEPATAN PENYUSUNAN RDTR	91
5.1. Tahap <i>Tracking</i>	91
5.2. Tahap <i>Analyzing</i>	108
VIPERUMUSAN MODEL/INISIATIF KEBIJAKAN BARU YANG MAMPU MENDORONG PERCEPATAN PENYUSUNAN RDTR	148
6.1 Tahap <i>Imaging</i>	150
6.2 Tahap <i>Deciding</i>	156
VII PENUTUP	167
7.1 Kesimpulan	167

7.2 Rekomendasi	168
DAFTAR PUSTAKA	172
LAMPIRAN	181
RIWAYAT HIDUP	260

Hak cipta milik IPB University

DAFTAR TABEL

1 Substansi dan potensi kebaruan penelilitain yang diusulkan	10
2 Tingkat dan karakteristik dokumen RTR di Perancis	18
3 Metode analisis	57
4 Kedudukan perencanaan skenario terhadap penelitian	63
5 Unsur dan alasan pemilihan	64
6 <i>Timeline</i> penjadwalan FGD	66
7 Kendala penyusunan RDTR	69
8 Kriteria dan sub kriteria	71
9 Target responden survei AHP	72
10 Nilai inkonsistensi pada analisis AHP	73
11 Hasil analisis data survei AHP dari masing-masing kelompok pakar menurut kriteria dan subkriteria	74
12 Indeks kriteria kesiapan penyusunan RDTR	86
13 Bobot dalam <i>readiness criteria indeks</i>	89
14 Kegiatan yang dinilai dalam survei post reuiu	92
15 Hasil uji validitas dan uji reabilitas	93
16 Hasil analisis aspek substantif penyusunan RDTR	94
17 Temuan aspek substantif penyusunan RDTR	95
18 Hasil Analisis Aspek Kelengkapan Teknis dan Substantif dalam Rangka Persetujuan Substansi	96
19 Temuan aspek kelengkapan teknis dan substantif dalam rangka persetujuan substansi	98
20 Hasil analisis aspek kelengkapan administratif (kronologis)	99
21 Temuan aspek kelengkapan administratif (kronologis)	101
22 Perbandingan kendala penyusunan RDTR	101
23 Progres RDTR DSP atau KSPN	120
24 Perubahan kewenangan dalam penyusunan RDTR	127
25 Perbedaan proses bisnis penyusunan dan penetapan RDTR sesuai PP 15/2010 dan PP 21/2021	136
26 Kendala, upaya & strategi, dan saran untuk proses penyusunan rdtr berdasarkan survei post reuiu	144
27 Perbandingan Kendala Penyusunan RDTR	152



DAFTAR GAMBAR

1	Rekapitulasi penetapan RDTR	4
2	Diagram alir penyelenggaraan penataan ruang	21
3	Hierarki rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang	22
4	Hierarki rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang	23
5	Sebaran RTR Pulau/Kepulauan dan RTR KSN Berdasarkan tipologi s.d tahun 2019	24
6	Persebaran lokasi RTR KSN	24
7	Persebaran lokasi RDTR KPN s.d. tahun 2019	25
8	Proses penyusunan RTR	26
9	Siklus Hidup BPM	30
10	Arsitektur Proses Bisnis	30
11	Kerangka pikir penelitian	55
12	Hierarki yang digunakan dalam AHP	59
13	Langkah menyusun strategi dalam percepatan penyusunan RDTR	67
14	Hierarki faktor pengaruh yang digunakan dalam penelitian	72
15	Presentase hasil kuesioner penentuan faktor pengaruh percepatan RDTR	73
16	Perbandingan bobot pada seluruh kriteria	76
17	Perbandingan bobot pada kriteria komitmen pemerintah daerah	77
18	Perbandingan bobot pada kriteria ketersediaan data	78
19	Perbandingan bobot pada kriteria aspek manajerial	79
20	Rekapitulasi bantuan teknis RDTR 2015-2023	80
21	Perbandingan bobot pada kriteria aspek kebijakan	81
22	Perbandingan bobot pada kriteria aspek dukungan TIK	82
23	Agregat nilai bobot untuk kriteria	83
24	Agregat nilai bobot untuk seluruh subkriteria	84
25	Presentase pengumpulan data kuesioner <i>post reuiu</i>	93
26	Sebaran JF penata ruang menurut provinsi	106
27	Status progres penyusunan RTRW provinsi/kabupaten/kota	109
28	Penyelenggara satu data Indonesia	111
29	Peta koridor pembangunan wilayah RPJMN 2020-2024	113
30	Amanat RPJMN 2020-2024 dalam hal penyelesaian RTR nasional dan daerah	114
31	Hubungan antar <i>stakeholder</i>	129
32	Aliran data pada tahapan penyusunan RDTR Setelah UU Cipta Kerja	129
33	Status materi teknis RDTR Hasil INSPIRING <i>batch</i> II	133
34	Status materi teknis RDTR hasil INSPIRING <i>batch</i> III	133
35	Status materi teknis RDTR hasil INSPIRING <i>batch</i> IV	134
36	Kerangka waktu kebijakan percepatan RDTR	135
37	Tahapan penyusunan RDTR sesuai permen 16/2018 dan permen 8/2017	139
38	Tahapan penyusunan RDTR sesuai permen 11/2021	140
39	Proses bisnis penyusunan RDTR Level 1	141
40	Alur perencanaan skenario	148
41	Proses bisnis penyusunan RDTR Level 2 (<i>as is</i>)	153

Hak cipta milik IPB University

IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

DAFTAR GAMBAR (LANJUTAN)

42 Perbandingan durasi penyusunan RDTR	155
43 Alur otomasi RDTR <i>builder</i>	159
44 Proses bisnis penyusunan RDTR Level 2 (to be)	164

DAFTAR LAMPIRAN

1 Matriks perbedaan peran stakeholder dalam penyusunan RDTR Berdasarkan Permen ATR/BPN nomor 8 tahun 2017 dan nomor 16 tahun 2018 serta Permen ATR/BPN nomor 11 tahun 2021	182
2 Peran stakeholder dan aliran data/informasinya	185
3 Instrumen Survei Analytic Hierarchy Process	191
4 Tahapan Penyusunan RDTR	202
5 Proses Bisnis Penyusunan RDTR	203
6 Instrumen Survei Post Reviu	211
7 Responden Survei	229
8 Kendala, Upaya, Saran dalam Proses Penyusunan RDTR melalui Survei Post Reviu	241
9 Korelasi Analisis AHP dan Post Reviu	247
10 Matrik Relasi Antar Komponen Analisis	252
11 Readiness Criteria Index untuk Penyusunan RDTR	253